

Peranan Kawasan Industri dalam Mengatasi Gejala Deindustrialisasi *Role of Industrial Estate in Overcoming Deindustrialization*

Winardi^{a,*}, DS Priyarsono^b, Hermanto Siregar^b, & Heru Kustanto^c

^aDirektorat Perwilayahan Industri, Kementerian Perindustrian

^bProgram Studi Ilmu Perencanaan dan Pembangunan Wilayah Perdesaan, Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor

^cPusat Penelitian dan Pengembangan Industri Agro, Kementerian Perindustrian

[diterima: 24 Januari 2018 — disetujui: 22 Maret 2018 — terbit daring: 13 Maret 2019]

Abstract

Industrial area is one of the determinant factors in the development of manufacturing industry in a region. Theoretically, industrial companies located in industrial areas have an impact on increasing productivity, added value, efficiency, and economic income of a region. This research aims to analyze the role of industrial area in overcoming the deindustrialization symptom with Social Accounting Matrix Model. The result of analysis shows that industrial area has an important role in increasing the output of economy and the absorption of bigger workforce so that indirectly will have an impact on acceleration of industrialization process and also to overcome deindustrialization.

Keywords: industrial estate; manufacturing industry; deindustrialization; output; labor; SAM

Abstrak

Kawasan industri merupakan salah satu faktor penentu dalam perkembangan industri manufaktur pada suatu wilayah. Secara teoretis, perusahaan industri yang berlokasi di kawasan industri berdampak pada peningkatan produktivitas, nilai tambah, efisiensi, dan pendapatan ekonomi suatu wilayah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan kawasan industri dalam mengatasi gejala deindustrialisasi dengan Model *Social Accounting Matrix*. Hasil analisis menunjukkan bahwa kawasan industri mempunyai peranan penting dalam peningkatan *output* perekonomian dan penyerapan tenaga kerja yang lebih besar, sehingga secara tidak langsung akan berdampak pada percepatan proses industrialisasi sekaligus mengatasi gejala deindustrialisasi.

Kata kunci: kawasan industri; industri manufaktur; deindustrialisasi; *output*; tenaga kerja; SAM

Kode Klasifikasi JEL: R11, E16

Pendahuluan

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang, dalam beberapa tahun terakhir ini sering disebut sedang mengalami gejala deindustrialisasi bahkan sudah terjadi deindustrialisasi. Hal ini ditandai dengan penurunan kinerja sektor industri pengolahan dalam lima tahun terakhir, baik dari indikator kontribusi sektor industri terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), pertumbuhan sektor industri, mau-

pun dari indikator *share* tenaga kerja sektor industri pengolahan terhadap total tenaga kerja. Seperti terlihat pada Gambar 1, kontribusi sektor industri nasional terhadap PDB tahun 2011 sebesar 21,76% terus mengalami penurunan menjadi 20,51% pada 2016. Demikian pula pertumbuhan sektor industri yang pada 2011 sempat tumbuh sebesar 6,02%, namun terus menurun menjadi 4,29% pada 2016. Kondisi yang sama pada *share* jumlah tenaga kerja sektor industri yang terus berkurang dari 13,54% pada 2011 menjadi 13,12% di 2016. Penurunan *share* tenaga kerja terbesar terjadi pada 2013, yaitu dari 13,88% pada 2012 menjadi 13,27% di 2013. Hal ini

*Alamat Korespondensi: Gedung Kementerian Perindustrian Lt. 14, Jl. Gatot Subroto Kav. 52–53, Jakarta 12950. E-mail: winardi@kemenperin.go.id dan winzain82@gmail.com.

disebabkan salah satunya oleh tingkat penyerapan tenaga kerja sektor lain, khususnya sektor jasa (perdagangan, restoran, dan hotel) yang mengalami peningkatan dari 20,76% pada 2012 menjadi 21,38% di 2013. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), *share* tenaga kerja sektor jasa dari tahun ke tahun selalu lebih tinggi dibandingkan dengan *share* tenaga kerja sektor industri.

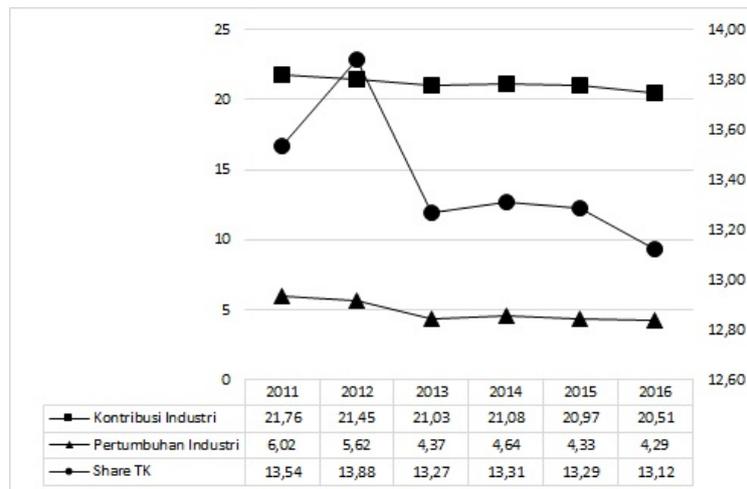
Berdasarkan kinerja sektor industri nasional tersebut dan dihubungkan dengan konsep deindustrialisasi yang dipahami saat ini, maka dapat dikatakan bahwa Indonesia saat ini sedang mengalami proses deindustrialisasi. Adapun konsep deindustrialisasi yang dimaksud adalah seperti yang dikemukakan oleh Jalilian dan Weiss (2000) dan Rowthorn dan Coutts (2004) bahwa deindustrialisasi adalah terjadinya penurunan kontribusi sektor industri pengolahan terhadap perekonomian nasional dan penurunan proporsi jumlah tenaga kerja sektor industri pengolahan terhadap total tenaga kerja. Rowthorn dan Wells (1987) membedakan deindustrialisasi menjadi dua, yaitu deindustrialisasi positif dan negatif. Deindustrialisasi positif merupakan deindustrialisasi yang terjadi secara alami sebagai konsekuensi kemapanan perekonomian suatu negara/wilayah, sedangkan deindustrialisasi negatif merupakan indikasi kinerja perekonomian yang mengalami perlambatan bahkan memburuk yang berakibat pada penurunan tingkat produktivitas sektor industri pengolahan, atau dengan kata lain deindustrialisasi negatif adalah deindustrialisasi yang terjadi belum pada waktunya.

Salah satu penelitian terkait deindustrialisasi di Indonesia dilakukan oleh Priyarsono (2011) yang menyimpulkan bahwa proses deindustrialisasi yang terjadi di Indonesia selama ini bukan merupakan fenomena alami sebagaimana yang terjadi di negara maju pada umumnya, tetapi hanya merupakan fenomena deindustrialisasi negatif (*pre-mature*). Deindustrialisasi negatif tersebut dapat disebabkan oleh adanya guncangan ekonomi-

an nasional, seperti menurunnya tingkat investasi, menurunnya kinerja perdagangan luar negeri, menurunnya impor bahan baku, dan banyaknya produk-produk impor barang konsumsi.

Dalam upaya mengatasi deindustrialisasi tersebut, sejak 2014 pemerintah sebenarnya telah melakukan upaya-upaya konkret berupa reformasi kebijakan pembangunan ekonomi, termasuk kebijakan sektor industri. Seperti terbitnya Undang-Undang (UU) No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan berbagai peraturan pelaksanaannya serta berbagai Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) terkait sektor industri. Pada PKE I, salah satu tujuan deregulasi adalah memulihkan dan meningkatkan kegiatan dan daya saing industri melalui efisiensi pengadaan bahan baku, membuat ekspor lebih lancar, dan menjamin kepastian berusaha dan investasi. Kemudian pada PKE II, pemerintah memberikan layanan cepat dalam bentuk pemberian izin investasi dalam waktu tiga jam di Kawasan Industri. Pada PKE VI, pemerintah memberikan insentif kemudahan investasi di delapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Dari 8 KEK tersebut, 5 KEK merupakan kawasan ekonomi dengan kegiatan utamanya adalah kegiatan usaha kawasan industri. Sementara itu, perhatian pemerintah untuk industri padat karya dituangkan dalam PKE VII berupa pengurangan beban pajak untuk sementara.

Dari berbagai deregulasi tersebut, sampai saat ini efektivitasnya masih dipertanyakan dalam mengatasi deindustrialisasi di Indonesia. Untuk menjawab hal tersebut, dilakukan penelitian ini yang pada dasarnya memperkuat kebijakan-kebijakan yang telah diambil pemerintah tersebut, seperti kebijakan pembangunan kawasan industri. Salah satu kebijakan terkait kawasan industri diamanatkan pada UU No. 3 Tahun 2014 bahwa setiap perusahaan industri wajib berlokasi di kawasan industri. Menurut Mulyadi (2012), kawasan industri yang dilengkapi dengan ketersediaan infrastruktur dasar, infrastruktur penunjang, dan sarana penunjang yang memadai akan



Gambar 1: Kinerja Sektor Industri Pengolahan Nasional Tahun 2011–2016

Sumber: *Statistik Produk Domestik Bruto Indonesia 2011–2016* (BPS), diolah

memberikan keuntungan bagi perusahaan industri yang berlokasi di kawasan industri tersebut. Hal ini disebabkan perusahaan industri tidak akan mengeluarkan biaya untuk pembangunan infrastruktur. Berbeda halnya apabila perusahaan industri yang berlokasi di luar kawasan industri, yang mana perusahaan harus melakukan pembangunan sendiri berbagai infrastruktur yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Dengan demikian, perusahaan industri yang berlokasi di kawasan industri akan memperoleh keuntungan berupa peningkatan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, dan membuka lapangan kerja, serta berdampak pula pada peningkatan pendapatan ekonomi suatu wilayah.

Keuntungan berlokasi di kawasan industri tersebut masih perlu dilakukan konfirmasi secara kuantitatif bahwa kawasan industri mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, meningkatkan kontribusi sektor industri terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)/Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan meningkatkan *share* tenaga kerja sektor industri terhadap total tenaga kerja secara nasional. Apabila secara kualitatif terkonfirmasi, maka kawasan industri secara empiris mempunyai peranan penting dalam mempercepat

proses industrialisasi sekaligus mengatasi gejala deindustrialisasi di Indonesia.

Tinjauan Literatur

Kawasan Industri

Istilah kawasan industri pertama kali diperkenalkan di Inggris pada akhir abad ke-19, yang definisi paling awal dikemukakan oleh William Bredo. Menurut Bredo (1960), kawasan industri merupakan sebidang lahan yang dibagi dan dikembangkan berdasarkan perencanaan yang komprehensif untuk penggunaan sekelompok perusahaan industri. Perencanaan tersebut di dalamnya mencakup rencana pembangunan infrastruktur dasar dan penunjang serta rencana pengelolaan kawasan industri. Alexander (1963) mendefinisikan kawasan industri sebagai sekelompok pabrik yang dibangun pada skala ekonomi di lokasi yang sesuai dan dilengkapi berbagai fasilitas seperti fasilitas air bersih, sarana transportasi, fasilitas energi, perkantoran (bank dan pos), kantin, sarana olahraga, dan poliklinik. Semua fasilitas dan utilitas tersebut disediakan perusahaan dengan pengaturan khusus dalam pedoman teknis

fasilitas pelayanan umum.

United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) (1997) mendefinisikan kawasan industri sebagai sebidang lahan yang dikembangkan dan dibagi menjadi kavling-kavling sesuai perencanaan dan dilengkapi dengan infrastruktur jalan, transportasi, dan utilitas umum lainnya. Sebagai sarana implementasi kebijakan, kawasan industri dibangun dalam rangka untuk menyediakan fasilitas-fasilitas pelayanan penunjang, sehingga mendorong tumbuhnya industri manufaktur. Fasilitas tersebut terkait dengan fasilitas transportasi, energi, pergudangan, logistik, pendidikan, penelitian, pusat bisnis, pengolahan data, perumahan, pariwisata, olahraga, dan fasilitas medis. Falcke (1999) juga mengemukakan bahwa kawasan industri merupakan kawasan yang menyediakan lahan dan berbagai fasilitas layanan seperti jalan, telekomunikasi, utilitas, pengumpulan limbah, pengolahan limbah, pengujian, kontrol kualitas standar, layanan keamanan, tempat rekreasi, rumah sakit, dan kantor pos. Sementara itu, menurut Kumar (2008), kawasan industri merupakan area geografis yang batas-batasnya jelas dan dilengkapi dengan fasilitas infrastruktur yang berkualitas tinggi sebagai tempat berusaha bidang industri. Kawasan industri tersebut dikelola oleh otoritas tunggal yang memiliki legalitas dalam berhubungan dengan para *tenant*. Otoritas tersebut membuat berbagai peraturan/ketentuan dalam rangka pengelolaan dan operasional kawasan industri seperti membuat aturan zonasi, aksesibilitas, dan penggunaan berbagai utilitas.

Sementara di Indonesia, istilah kawasan industri tercantum pada Keputusan Presiden No. 53 Tahun 1989 tentang Kawasan Industri, kemudian diperbaharui pada Peraturan Pemerintah No. 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri dan UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Menurut UU No. 3 Tahun 2014, kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dileng-

kapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri.

Pembangunan kawasan industri bertujuan untuk mendorong pertumbuhan sektor industri lebih terarah, terpadu, dan memberikan hasil guna yang lebih optimal bagi daerah di mana kawasan industri berlokasi. UNIDO (2012) membedakan tujuan pembangunan kawasan industri di negara maju dan berkembang. Di negara maju bertujuan untuk meminimalkan eksternalitas negatif (seperti polusi dan kemacetan), sehingga kawasan industri direncanakan sebagai kluster pergudangan dan pusat distribusi, bahkan pada beberapa negara, kawasan industrinya dikonversi menjadi *eco industrial park*, sedangkan di negara berkembang kawasan industri bertujuan untuk (a) mendorong pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja di tingkat nasional, regional, dan lokal; (b) menarik investasi asing; dan (c) memacu perkembangan sektor industri.

Menurut Kumar (2008), tujuan pembangunan kawasan industri adalah (a) mendorong pengembangan industri dan kewirausahaan; (b) mendorong pertumbuhan industri skala kecil; (c) mewujudkan pembangunan yang terdesentralisasi ke seluruh wilayah; (d) mendorong tumbuhnya industri pendukung industri besar, baik sektor swasta maupun publik; (e) menarik investasi; (f) menciptakan lapangan kerja; dan (g) memanfaatkan sumber bahan baku, sumber daya tenaga kerja terampil, dan kedekatan dengan pasar.

Deindustrialisasi

Deindustrialisasi merupakan suatu istilah yang dipopulerkan oleh Bluestone dan Harrison (1982) dalam buku "*The Deindustrialization of Amerika*" yang menggambarkan perubahan sosiologis ekonomi akibat penutupan pabrik dan perubahan upah dalam lapangan kerja yang terjadi di Amerika Serikat sejak periode 1950-an. Konsep deindustrialisasi telah banyak dikemukakan oleh para pakar di anta-

ranya menurut Cairncross (1982), deindustrialisasi diartikan sebagai penurunan *output* dari sektor industri manufaktur atau ketenagakerjaan di sektor industri manufaktur yang disebabkan oleh perpindahan kontribusi dari sektor manufaktur ke sektor jasa, sehingga kontribusi sektor industri manufaktur lebih rendah dari total *output*. Menurut Lever (1991), deindustrialisasi adalah penurunan *share* sektor industri manufaktur terhadap perdagangan luar negeri, sehingga terdapat kegagalan untuk meraih surplus nilai ekspor dengan impor. Rowthorn dan Ramaswamy (1997) juga mengemukakan bahwa deindustrialisasi didefinisikan sebagai turunnya proporsi tenaga kerja sektor industri dari keseluruhan tenaga kerja dalam sebuah perekonomian.

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, deindustrialisasi secara konseptual merupakan suatu kemunduran sektor industri di suatu negara yang berlangsung secara berkelanjutan, atau dengan kata lain turunnya peranan industri dalam perekonomian secara menyeluruh. Penurunan ini bisa diamati dari berbagai sisi, seperti turunnya jumlah tenaga kerja di sektor industri, turunnya jumlah ekspor produk industri, dan turunnya sektor industri dibandingkan sektor lain. Salah satu penyebab terjadinya deindustrialisasi adalah hilangnya keunggulan kompetitif dari sektor industri suatu negara. Jika hal ini terjadi, maka produk negara tersebut tidak mampu bersaing di pasar global, sehingga kinerja sektor industri akan menurun dan pada akhirnya para investor menarik investasinya dari sektor industri ke sektor lain atau bahkan ke negara lain.

Fenomena deindustrialisasi praktis telah terjadi di negara-negara maju di dunia dalam 25 tahun terakhir, yang mana peran sektor industri dalam menciptakan lapangan kerja dan kontribusinya terhadap PDB telah menurun. Menurut Iversen dan Cusack (2000), salah satu sumber penyebab deindustrialisasi di negara-negara maju adalah adanya proses memindahkan fasilitas produksi ke negara-negara dengan biaya upah yang lebih rendah atau

relokasi industri ke negara-negara berkembang, sehingga pada gilirannya akan mengurangi jumlah permintaan tenaga kerja sektor industri di negara maju. Rodrik (2016) juga mengemukakan bahwa sampai tahun 2013 telah terjadi relokasi industri manufaktur yang signifikan dari bagian dunia yang lebih kaya (negara maju) ke Asia atau negara berkembang, sehingga berdampak pada terjadinya deindustrialisasi. Relokasi industri ke negara berkembang umumnya dilakukan oleh sektor-sektor industri padat karya. Motivasi utama relokasi ini adalah minimalisasi biaya, khususnya biaya tenaga kerja. Sebagai konsekuensi, yang dihadapi oleh negara-negara maju adalah terjadinya pengalihan lapangan pekerjaan dari negara maju ke negara berkembang.

Metode

Objek pada penelitian ini adalah Provinsi Jawa Barat dengan pertimbangan bahwa terdapat 25 kawasan industri di Jawa Barat atau 33,8% kawasan industri di Indonesia berlokasi di Jawa Barat. Jenis data yang digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari BPS Pusat, BPS Provinsi Jawa Barat, Pusdalitbang Provinsi Jawa Barat, Bappeda Provinsi Jawa Barat, dan Kementerian Perindustrian. Data sekunder tersebut terdiri dari *Tabel Input-Output Provinsi Jawa Barat 2010*, *Survei Sosial Ekonomi Nasional Tahun 2013*, *Neraca Keuangan Pemerintah Daerah*, *Survei Angkatan Kerja Daerah*, *Statistik Industri Besar dan Sedang Tahun 2013*, *Jawa Barat Dalam Angka*, dan *Direktori Kawasan Industri Tahun 2015*.

Model analisis yang digunakan adalah *Social Accounting Matriks* (SAM). SAM merupakan suatu kerangka data yang terintegrasi dan komprehensif yang menjelaskan kondisi perekonomian dan sosial suatu negara serta sekaligus menyajikan keterkaitan antar-variabel ekonomi dan sosial dalam suatu set kerangka kerja (Sutomo, 2015). Penggunaan model analisis SAM dalam analisis kebijakan telah

banyak digunakan, termasuk pada analisis kebijakan sektor industri, seperti yang telah dilakukan oleh Parikh dan Thorbecke (1996), Sinaga dan Susilowati (2007), Wanjala dan Were (2009), Pieters (2010), Psaltopoulos et al. (2011), dan Pisa et al. (2015). SAM juga merupakan suatu sistem akuntansi yang variabel-variabel ekonomi dan sosial-nya disusun dalam bentuk neraca yang mempunyai sisi debit dan kredit. Kedua sisi tersebut selalu berada dalam keadaan seimbang dan secara keseluruhan SAM menjelaskan suatu keseimbangan umum suatu kondisi ekonomi dan sosial suatu negara.

Analisis dalam penelitian ini adalah analisis simulasi kebijakan. Simulasi kebijakan dilakukan untuk melihat dampak dari investasi sektor industri pengolahan yang berlokasi di dalam kawasan industri terhadap *output* dan penyerapan tenaga kerja di Jawa Barat tahun 2013. Adapun metode simulasi yang akan dilakukan adalah dengan mengalikan matriks pengganda (M_a) dengan vektor eksogen (nilai biaya yang dialokasikan dalam investasi sektor industri pengolahan yang berlokasi di dalam dan luar kawasan industri). Vektor eksogen merupakan neraca yang memuat neraca modal dan transaksi luar negeri atau *rest of the world* (Daryanto dan Hafizrianda, 2010).

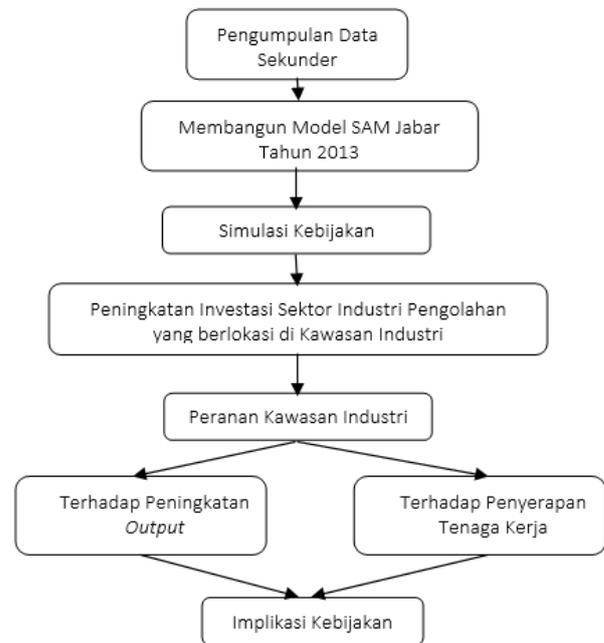
Matriks pengganda dapat diperoleh dari distribusi pendapatan dan pengeluaran neraca endogen yang diformulasikan:

$$Y = T + X \quad (1)$$

dengan Y adalah pendapatan/pengeluaran; T adalah transaksi; dan X adalah neraca eksogen.

Selanjutnya diasumsikan besarnya kecenderungan rata-rata pengeluaran yang merupakan perbandingan antara pengeluaran sektor ke- j untuk sektor ke- i dengan total pengeluaran ke- j (Y_j), maka:

$$A_{ij} = \frac{T_{ij}}{Y_j} \quad (2)$$



Gambar 2: Kerangka Analisis
Sumber: Penulis

Persamaan (1) dibagi dengan Y , maka diperoleh:

$$Y/Y = T/Y + X/Y \quad (3)$$

Persamaan (2) disubstitusikan ke Persamaan (3) diperoleh: $I = A + X/Y$

$$(I-A)Y = X$$

$$Y = (I - A)^{-1}X$$

Jika $(I - A)^{-1} = M_a$, maka diperoleh:

$$Y = M_a X \quad (4)$$

dengan M_a merupakan matriks pengganda neraca (*accounting multiplier matrix*).

Adapun simulasi kebijakan pembangunan kawasan industri dilakukan dengan memberi *shock* berupa peningkatan investasi pada sektor industri pengolahan. Pada saat membangun Tabel SAM Provinsi Jawa Barat tahun 2013, sektor industri pengolahan dilakukan disagregasi menjadi 2 sektor, yaitu sektor industri pengolahan yang berlokasi di dalam kawasan industri dan sektor industri peng-

lahan yang berlokasi di luar kawasan industri. Oleh karena itu, untuk melihat peranan kawasan industri didekati dengan melakukan *shock* berupa peningkatan investasi pada sektor industri pengolahan, baik yang berlokasi di dalam maupun luar kawasan industri.

Skenario simulasi kebijakan pembangunan kawasan industri melalui peningkatan investasi sektor industri pengolahan, baik yang berlokasi di kawasan industri maupun di luar kawasan industri disajikan pada Tabel 1. Pertimbangan penetapan skenario simulasi ini adalah didasari oleh karakteristik industri di Provinsi Jawa Barat yang didominasi oleh sektor industri otomotif, elektronika, serta logam dan barang jadi dari logam yang merupakan industri padat modal, sedangkan sektor industri tekstil, pakaian jadi, kulit, dan alas kaki merupakan sektor padat karya, dan industri berbasis sumber daya alam terdiri dari sektor industri kimia, barang dari kimia, karet dan plastik, industri pengilangan minyak, serta industri makanan dan minuman. Adapun penentuan kebijakan peningkatan investasi sebesar 18% adalah didasarkan pada kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yaitu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013–2018 ditetapkan rata-rata target pertumbuhan investasi per tahun mulai dari tahun 2012 sampai 2018 sebesar 18% per tahun (RPJMD Provinsi Jawa Barat, 2013).

Hasil dan Analisis

Peranan Kawasan Industri terhadap *Output* Perekonomian Provinsi Jawa Barat

Kebijakan pembangunan kawasan industri berupa stimulus ekonomi melalui peningkatan investasi swasta dan pemerintah akan meningkatkan *output* perekonomian Provinsi Jawa Barat secara keseluruhan. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 3 yang

menunjukkan bahwa peningkatan investasi sebesar 18% pada sektor industri pengolahan di Provinsi Jawa Barat, baik yang berlokasi di dalam maupun di luar kawasan industri, mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat sebesar antara 0,0084% sampai 0,5233%. Sektor industri padat modal merupakan sektor yang memberikan dampak peningkatan *output* perekonomian yang lebih besar dibandingkan dengan sektor industri padat karya dan industri berbasis sumber daya alam. Peningkatan investasi di sektor industri padat modal di kawasan industri mendorong peningkatan nilai *output* perekonomian Provinsi Jawa Barat sebesar 0,36%. Sementara itu, peningkatan investasi di sektor industri padat karya di kawasan industri hanya mampu mendorong peningkatan nilai *output* perekonomian Provinsi Jawa Barat sebesar 0,036%.

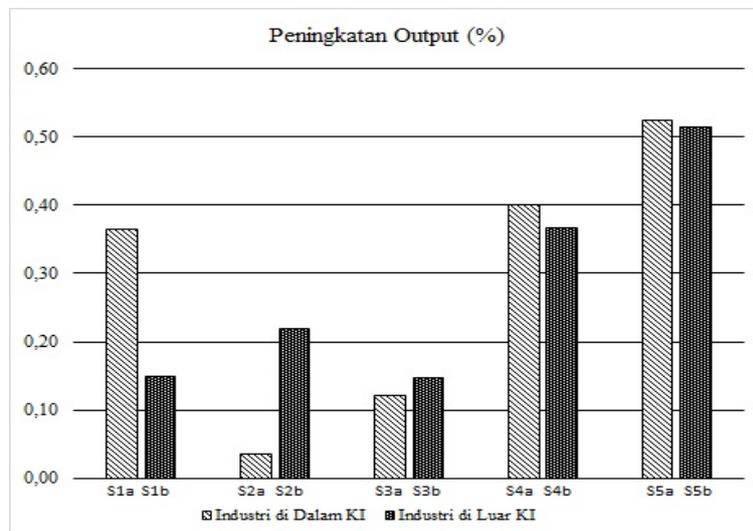
Sektor industri padat modal di Provinsi Jawa Barat didominasi oleh industri otomotif dan elektronika. Jumlah industri otomotif yang berlokasi di kawasan industri sebanyak 230 perusahaan. Industri otomotif tersebut menggunakan bahan baku yang berasal dari paduan logam, baja dan besi olahan, alat listrik, karet, kertas, plastik, dan kulit. Dari semua bahan baku dan komponen serta komponen lainnya yang dihasilkan kemudian diproduksi menjadi kendaraan bermotor yang dikembangkan sebagian besar berlokasi di kawasan industri di Jawa Barat. Demikian pula sektor industri elektronika, bahan baku yang digunakan adalah besi baja, aluminium, kuningan, seng, tembaga, dan bahan baku lainnya. Dari semua bahan baku tersebut dirakit dan diproses sampai menghasilkan produk akhir elektronika yang terdiri dari TV, AC, lemari es, dan berbagai produk lainnya. Proses produksi sebagian besar berlokasi di kawasan industri di Jawa Barat.

Sementara itu, peningkatan investasi di sektor industri padat karya di kawasan industri hanya mampu mendorong peningkatan nilai *output* perekonomian Provinsi Jawa Barat sebesar 0,036%. Peningkatan *output* tersebut lebih kecil bila diban-

Tabel 1: Skenario Simulasi Kebijakan

| No | Skenario | Kode |
|----|--|------|
| 1 | Peningkatan investasi sektor industri padat modal di kawasan industri sebesar 18% | S1a |
| 2 | Peningkatan investasi sektor industri padat modal yang berlokasi di luar kawasan industri sebesar 18% | S1b |
| 3 | Peningkatan investasi sektor industri padat karya yang berlokasi di kawasan industri sebesar 18% | S2a |
| 4 | Peningkatan investasi sektor industri padat karya yang berlokasi di luar kawasan industri sebesar 18% | S2b |
| 5 | Peningkatan investasi sektor industri berbasis sumber daya alam yang berlokasi di kawasan industri sebesar 18% | S3a |
| 6 | Peningkatan investasi sektor industri berbasis sumber daya alam yang berlokasi di luar kawasan industri sebesar 18% | S3b |
| 7 | Peningkatan investasi sektor industri padat modal dan padat karya di kawasan industri sebesar 18% | S4a |
| 8 | Peningkatan investasi sektor industri padat modal dan padat karya yang berlokasi di luar kawasan industri sebesar 18% | S4b |
| 9 | Peningkatan investasi sektor industri padat modal, padat karya, dan berbasis sumber daya alam (SDA) di kawasan industri sebesar 18% | S5a |
| 10 | Peningkatan investasi sektor industri padat modal, padat karya, dan berbasis SDA yang berlokasi di luar kawasan industri sebesar 18% | S5b |

Sumber: Penulis



Gambar 3: Dampak Pembangunan Kawasan Industri terhadap *Output* Perekonomian Provinsi Jawa Barat Tahun 2013
Sumber: Hasil Pengolahan Penulis

dingkan dengan sektor industri padat karya yang berlokasi di luar kawasan industri, yang mampu mendorong peningkatan nilai *output* perekonomian Provinsi Jawa Barat sebesar 0,22%. Kondisi ini menggambarkan bahwa industri padat karya yang terdiri dari industri tekstil, pakaian jadi, kulit, dan alas kaki di Provinsi Jawa Barat lebih dominan berlokasi di luar kawasan industri yaitu sebesar 94,6%. Industri padat karya tersebut paling banyak berlokasi di wilayah Bandung, yaitu sekitar lebih dari 300 perusahaan tekstil dan produk tekstil. Ka-

rakteristik industri tekstil yang pada umumnya menghasilkan limbah cair yang dapat berpotensi mencemari lingkungan, maka saat ini pemerintah telah mewajibkan investasi pembangunan perusahaan tekstil dan produk tekstil wajib berlokasi di kawasan industri. Dengan demikian, ke depan diprediksi bahwa jumlah perusahaan padat karya, khususnya industri tekstil dan produk tekstil, akan lebih banyak berlokasi di kawasan industri dibandingkan dengan industri tekstil dan produk tekstil eksisting yang sekarang. Begitu pula dari aspek pe-

nyerapan tenaga kerja, *output*, dan penciptaan nilai tambah, industri padat karya akan lebih banyak bersumber dari kawasan industri.

Adapun industri yang berbasis sumber daya alam di Provinsi Jawa Barat yang terdiri dari industri makanan dan minuman; industri kayu, bambu, rotan dan furnitur; industri kertas dan barang dari kertas; industri kimia, barang dari kimia, karet dan plastik; dan industri pengilangan minyak bumi dilakukan stimulus peningkatan investasi di kawasan industri, maka akan memberikan dampak terhadap peningkatan *output* perekonomian Provinsi Jawa Barat sebesar 0,12% yang lebih besar daripada dampak yang ditimbulkan oleh industri padat karya di kawasan industri. Provinsi Jawa Barat memiliki potensi geografis, pasar, dan sentra-sentra produksi hasil pertanian, perkebunan, dan peternakan. Namun potensi tersebut belum dikembangkan secara maksimal, sehingga *output* produk-produk olahan yang berbasis agro masih lebih rendah dibandingkan dengan industri padat modal. Berdasarkan data industri besar dan sedang Provinsi Jawa Barat tahun 2013, menunjukkan bahwa kontribusi industri berbasis sumber daya alam terhadap penciptaan total *output* masih relatif kecil, yaitu di bawah 8%. Industri makanan dan minuman berkontribusi terhadap penciptaan *output* sebesar 7,53%; industri kayu, bambu, rotan, dan furnitur sebesar 1,36%; dan industri kertas dan barang dari kertas berkontribusi sebesar 5,64%.

Perbandingan dampak peningkatan investasi sektor industri pengolahan berdasarkan lokasi industri menunjukkan bahwa investasi di dalam kawasan industri memberikan dampak pertumbuhan *output* yang lebih besar daripada investasi di luar kawasan industri. Kondisi ini terlihat dari hasil simulasi 5 bahwa peningkatan investasi pada industri padat modal, padat karya, dan industri berbasis sumber daya di kawasan industri masing-masing sebesar 18% mampu meningkatkan *output* perekonomian Provinsi Jawa Barat sebesar 0,52%, yang lebih be-

JEPI Vol. 19 No. 1 Januari 2019, hlm. 84–95

sar dibandingkan dengan peningkatan investasi pada sektor industri yang sama tetapi berlokasi di luar kawasan industri. Dampak peningkatan *output* yang diberikan oleh kawasan industri tersebut juga menunjukkan tingginya tingkat produktivitas dan efisiensi perusahaan industri di dalam kawasan industri karena berdasarkan data BPS tahun 2013 bahwa jumlah perusahaan industri yang berlokasi di dalam kawasan industri di Provinsi Jawa Barat hanya sebesar 1.380 perusahaan (21,42%), sedangkan jumlah perusahaan industri yang berlokasi di luar kawasan industri lebih banyak, yaitu 5.063 perusahaan (78,58%). Demikian pula, tenaga kerja di dalam kawasan industri yang berjumlah 382.125 orang lebih sedikit dibandingkan dengan tenaga kerja perusahaan industri di luar kawasan industri yang berjumlah 1.074.254 orang.

Hasil ini sejalan dengan pemikiran Mulyadi (2012) bahwa industri pengolahan yang berlokasi di dalam kawasan industri akan memacu pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Kondisi ini terlihat di wilayah yang memiliki kawasan industri, yang pertumbuhan ekonominya lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi rata-rata nasional, seperti di Provinsi Banten dan Jawa Barat. Demikian pula hasil penelitian Cainelli (2008) yang meneliti tingkat produktivitas suatu perusahaan industri apabila berlokasi di kawasan industri. Hasil penelitiannya menemukan bahwa tingkat produktivitas perusahaan yang berlokasi di kawasan industri lebih besar dibandingkan perusahaan yang berlokasi di luar kawasan industri. Hasil penelitian ini juga memperkuat hasil penelitian Molina-Morales dan Martínez-Fernández (2003) yang meneliti tingkat penciptaan nilai tambah di 350 perusahaan di Valencia, Spanyol. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara perusahaan yang berlokasi di dalam kawasan industri dengan penciptaan nilai tambah yang lebih besar, dibandingkan dengan perusahaan yang berlokasi di luar kawasan industri.

Peranan Kawasan Industri terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

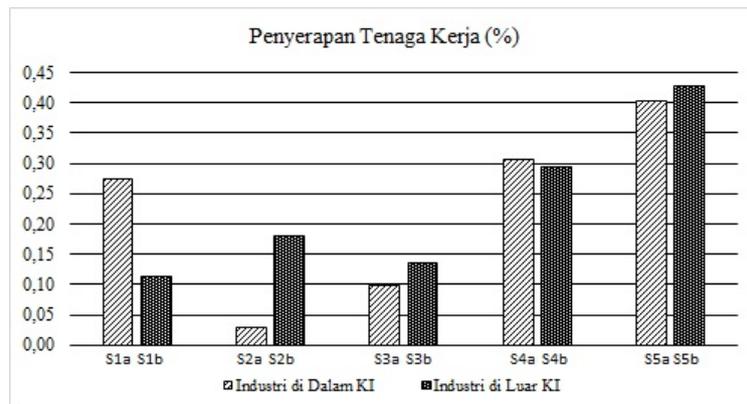
Sektor industri pengolahan di Provinsi Jawa Barat sampai tahun 2013 mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 1.456.379 orang. Sektor industri padat karya (industri tekstil, pakaian jadi, kulit, dan alas kaki) merupakan sektor industri dengan jumlah tenaga kerja terbesar yaitu sekitar 593.899 orang (40,78%), sedangkan sektor industri padat modal (industri alat angkut, mesin, peralatan, dan elektronika) hanya mampu menyerap tenaga sebanyak 327.155 orang (22,46%). Tenaga kerja industri pengolahan tersebut lebih banyak bekerja di industri yang berlokasi di luar kawasan industri dengan persentase sebesar 73,76% dan tenaga kerja yang bekerja di industri yang berlokasi di kawasan industri hanya sebesar 26,24%.

Berdasarkan kondisi eksisting penyerapan tenaga kerja sektor industri pengolahan, baik yang berlokasi di dalam maupun di luar kawasan industri tersebut, maka dilakukan simulasi dampak kebijakan pembangunan kawasan industri melalui peningkatan investasi sektor industri sebesar 18% dan hasilnya dapat dilihat pada Gambar 4 yang menunjukkan bahwa peningkatan investasi pada sektor industri pengolahan di Provinsi Jawa Barat mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja Provinsi Jawa Barat sebesar 0,0089% sampai 0,4285%. Sektor industri padat modal merupakan sektor yang memberikan dampak penyerapan tenaga kerja yang lebih besar dibandingkan dengan sektor industri padat karya dan industri berbasis sumber daya alam. Secara keseluruhan, apabila dilakukan peningkatan investasi ke semua jenis industri pengolahan, maka dampak penciptaan lapangan kerja baru sebesar 0,42% atau sebanyak 80.269 lapangan kerja di semua sektor produksi, dan khusus pada sektor industri pengolahan sebesar 19.341 lapangan kerja.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, pada dasarnya sektor industri di Provinsi Jawa Barat mempunyai peranan yang besar dalam menyediakan

lapangan kerja, sehingga sektor industri pengolahan di Jawa Barat dapat dikategorikan sebagai *leading sector* dan sebagai motor penggerak perekonomian. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil kajian Zheng *et al.* (2016) yang meneliti dampak investasi pemerintah pada pembangunan 110 kawasan industri baru di 8 kota besar di Cina terhadap penyediaan lapangan kerja industri pengolahan. Salah satu temuan dalam penelitian tersebut adalah pembangunan kawasan industri tersebut mampu memberikan kontribusi yang besar terhadap peningkatan penyerapan tenaga kerja. Demikian pula hasil penelitian Vidová (2010) yang meneliti perkembangan kawasan industri dan pengaruhnya terhadap penciptaan lapangan kerja di Slovakia. Kawasan industri di Slovakia membuka peluang bagi masuknya investasi asing dan menurunkan tingkat pengangguran dengan adanya sarana penciptaan lapangan kerja baru. Pembangunan kawasan industri di Slovakia berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja baru, yang sebagian besar lapangan kerja baru tersebut tersedia di wilayah yang terdapat kawasan industri.

Berdasarkan hasil analisis tersebut terlihat bahwa kawasan industri di Provinsi Jawa Barat mempunyai peranan yang cukup besar dalam mendorong peningkatan *output* perekonomian wilayah serta mampu menciptakan lapangan kerja yang lebih luas. Oleh karena itu, hasil penelitian ini pada dasarnya memperkuat kebijakan-kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah, seperti kebijakan pembangunan kawasan industri di Provinsi Jawa Barat melalui peningkatan investasi akan memberikan efek berganda pada penciptaan nilai tambah faktor produksi serta berdampak pada peningkatan *output* dan penyerapan tenaga kerja yang pada tahap selanjutnya akan mengatasi deindustrialisasi. Kemudian, jika pola penerapan kebijakan pembangunan kawasan industri di Provinsi Jawa Barat tersebut juga diterapkan di daerah lain, maka secara simultan akan dapat mengatasi proses deindustrialisasi di



Gambar 4: Dampak Pembangunan Kawasan Industri terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Provinsi Jawa Barat Tahun 2013

Sumber: Hasil Pengolahan Penulis

Indonesia, sekaligus mendorong percepatan proses industrialisasi atau reindustrialisasi.

Kesimpulan

Kebijakan pembangunan kawasan industri berupa stimulus ekonomi melalui peningkatan investasi berdampak pada peningkatan *output* dan penyerapan tenaga kerja. Sektor industri padat modal merupakan sektor yang memberikan dampak peningkatan *output* perekonomian dan penyerapan tenaga kerja yang lebih besar dibandingkan dengan sektor industri padat karya dan industri berbasis sumber daya alam. Pembangunan kawasan industri akan memberikan keuntungan yang lebih besar bagi perusahaan industri dan perekonomian pada suatu wilayah. Kondisi ini secara tidak langsung akan berdampak pada percepatan proses industrialisasi sekaligus mengatasi gejala deindustrialisasi.

Berdasarkan hal tersebut, gejala deindustrialisasi di Indonesia pada prinsipnya masih bisa diatasi dengan catatan komitmen pemerintah dalam mendorong dan menarik investasi melalui penyediaan lokasi industri berupa pembangunan kawasan industri baru perlu lebih ditingkatkan lagi, khususnya dalam hal investasi langsung pemerintah

JEPI Vol. 19 No. 1 Januari 2019, hlm. 84–95

dalam pembangunan kawasan industri baru, mengingat investasi yang dibutuhkan dalam membangun kawasan industri tersebut sangat besar dan merupakan investasi jangka panjang. Sejak 1989 sampai sekarang, peran pemerintah dalam pembangunan kawasan industri lebih banyak sebagai katalis dibandingkan sebagai fasilitator, sehingga perkembangan realisasi pembangunan kawasan industri sangat lambat. Hal ini terlihat dari banyaknya izin prinsip/persetujuan prinsip kawasan industri yang diterbitkan pemerintah pada saat itu (sekitar 200 izin prinsip) pada 1990-an, namun yang terealisasi pembangunan kawasan industri hanya sekitar 74 kawasan industri yang sebagian besar berlokasi di Provinsi Jawa Barat. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran pemerintah sebagai katalis tidak cukup untuk mengatasi deindustrialisasi. Oleh karena itu, perlu ditingkatkan peran pemerintah dalam pembangunan kawasan industri.

Daftar Pustaka

- [1] Alexander, P.C. (1963). *Industrial estates in India*. Bombay: Asia Publishing House.
- [2] Bluestone, B., & Harrison, B. (1982). *The deindustrialization of America*. New York: Basic Book.
- [3] Bredo, W. (1960). *Industrial estates: Tool for industrialization*.

- International Industrial Development Center, Stanford Research Institute.
- [4] Cainelli, G. (2008). Spatial agglomeration, technological innovations, and firm productivity: Evidence from Italian industrial districts. *Growth and Change*, 39(3), 414–435. doi:<https://doi.org/10.1111/j.1468-2257.2008.00432.x>.
- [5] Cairncross, A. (1982). What is deindustrialisation? In F. Blackaby (Ed.), *Deindustrialisation* (pp. 5–17). London: Pergamon.
- [6] Daryanto, A., & Hafizrianda, Y. (2010). *Analisis input-output & social accounting matrix untuk pembangunan ekonomi daerah*. Bogor: IPB Press.
- [7] Falcke, C. O. (1999). Industrial parks principles and practice. *Journal of Economic Cooperation among Islamic Countries*, 20(1), 1–10.
- [8] Iversen, T., & Cusack, T. R. (2000). The causes of welfare state expansion: deindustrialization or globalization?. *World Politics*, 52(3), 313–349. doi:<https://doi.org/10.1017/S0043887100016567>.
- [9] Jalilian, H., & Weiss, J. (2000). De-industrialisation in sub-Saharan Africa: myth or crisis?. *Journal of African Economies*, 9(1), 24–43. doi:<https://doi.org/10.1093/jae/9.1.24>.
- [10] Kumar, S. A. (2008). *Small business and entrepreneurship*. New Delhi: I.K. Intenational Publishing House.
- [11] Lever, W.F. (1991). Deindustrialisation and the Reality of the post-industrial city. *Urban Studies*, 28(6), 983–999. doi:<https://doi.org/10.1080/0266420989120081161>.
- [12] Molina-Morales, F. X., & Martínez-Fernaández, M. T. (2003). The impact of industrial district affiliation on firm value creation. *European Planning Studies*, 11(2), 155–170. doi:<https://doi.org/10.1080/0965431032000072855>.
- [13] Mulyadi, D. (2012). *Manajemen perwilayahan industri*. Jakarta: Kementerian Perindustrian.
- [14] Priyarsono, D. S. (2011). *Dari pertanian ke industri: Analisis pembangunan dalam perspektif ekonomi regional*. Bogor: IPB Press.
- [15] Parikh, A., & Thorbecke, E. (1996). Impact of rural industrialization on village life and economy: a social accounting matrix approach. *Economic Development and Cultural Change*, 44(2), 351–377. doi:<https://doi.org/10.1086/452218>.
- [16] Pieters, J. (2010). Growth and inequality in India: analysis of an extended social accounting matrix. *World Development*, 38(3), 270–281. doi:<https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2009.09.006>.
- [17] Pisa, N., Viviers, W., & Rossouw, R. (2015). Identifying industrial clusters for regional economic diversification: the case of South Africa's North West Province. *International Business & Economics Research Journal*, 14(3), 501–524. doi:<https://doi.org/10.19030/iber.v14i3.9212>.
- [18] Psaltopoulos, D., Skuras, D., & Thomson, K. J. (2011). Employment effects of private investment initiatives in rural areas of southern Europe: a regional SAM approach. *Agricultural Economics Review*, 12(2), 50–61.
- [19] Rodrik, D. (2016). Premature deindustrialization. *Journal of Economic Growth*, 21(1), 1–33. doi:<https://doi.org/10.1007/s10887-015-9122-3>.
- [20] Rowthorn, R., & Coutts, K. (2004). De-industrialisation and the balance of payments in advanced economies. *Cambridge Journal of Economics*, 28(5), 767–790. doi:<https://doi.org/10.1093/cje/beh034>.
- [21] Rowthorn, R., & Ramaswamy. (1997). Deindustrialization: Causes and implication. *IMF Working Paper WP/97/42*. Washington, DC: International Monetary Fund. <https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2016/12/30/Deindustrialization-Causes-and-Implications-2161>. [25 Oktober 2017].
- [22] Rowthorn, R., & Wells, J. (1987). *De-industrialization and foreign trade*. Cambridge: Cambridge University Press.
- [23] Sinaga, B. M., & Susilowati, S. H. (2007). Dampak kebijakan ekonomi di sektor agroindustri terhadap distribusi pendapatan sektoral, tenaga kerja dan rumahtangga di Indonesia: Analisis sistem neraca sosial ekonomi. *SOCA: Socioeconomics of Agriculture and Agribusiness*, 7(2), 1–19.
- [24] Sutomo, M. (2015). *Sistem data dan perangkat analisis ekonomi makro*. Bandung: CorBooks.
- [25] UNIDO. (1997). *Industrial estates: Principles and practices*. Vienna: United Nations Industrial Development Organization.
- [26] UNIDO. (2012). Europe and Central Asia Regional Conference on Industrial Parks: as a tool to foster local industrial development. *Conference Report*. Baku, Azerbaijan, 17–18 April 2012. <https://www.unido.org/sites/default/files/2012-10/Europe%20and%20Central%20Asia%20Regional%20Conference%20on%20Industrial%20Parks%20as%20a%20tool%20to%20foster%20local%20industrial%20development.0.pdf>. [8 September 2016].
- [27] Vidová, J. (2010). Industrial parks - history, present and its Influence to the Employment. *Review of Economic Perspectives*, 10(1), 41–58.
- [28] Wanjala, B. M., & Were, M. (2009). Gender disparities and economic growth in Kenya: A social accounting matrix approach. *Feminist Economics*, 15(3), 227–251. doi:<https://doi.org/10.1080/13545700902893114>.
- [29] Zheng, S., Sun, W., Wu, J., & Kahn, M. E. (2016). Urban agglomeration and local economic growth in China: The role of new industrial parks. *USC-INET Research Paper, 16-06*. USC Dornsife Institute fo New Economic Thingking, University of Southern California.